

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya bermanfaat untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam hasil penelitian lain, sehingga penulis dapat mengevaluasi kekurangan, kelebihan, serta kebaruan dalam hasil penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian terdahulu merupakan acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian untuk dapat menambah wawasan pengetahuan berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian terdahulu yang pertama oleh Yoga Nugraha (2022) yang berjudul Efektivitas Pelayanan Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Di UPT Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan menganalisis pelayanan sosial yang berada di UPT Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung. Metode dalam penelitian ini metode kuantitatif deskriptif.

Penelitian terdahulu yang kedua oleh Sulistia Ningsih (2022) yang berjudul Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Gelandangan dan Pengemis Di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektif atau tidaknya rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya Kota Pekanbaru. Selain itu, penelitian ini juga untuk mengetahui faktor penghambat dalam merehabilitasi gelandangan dan pengemis di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya Pekanbaru.

Penelitian terdahulu yang ketiga oleh Muhammad Rasyid (2022) yang berjudul Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Di

Kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di Kota Batam.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Perbedaan	Teori Konsep	Hasil Penelitian
1	Yoga Nugraha: Efektivitas Pelayanan Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Di UPT Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2022	Kuantitatif	Teori konsep, subjek penelitian, dan penentuan responden menggunakan teknik purposive.	1. ketercapaian tujuan 2. ketepatan strategi 3. ketersediaan sumber daya manusia 4. ketepatan sasaran 5. ketersediaan sarana dan prasarana 6. pengawasan dan pengendalian	Efektivitas pelayanan terhadap gelandangan dan pengemis cukup efektif, sehingga perlu di pertahankan dan ditingkatkan. Diharapkan program tersebut dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh UPT Rumah Singgah baik secara kuantitas maupun kualitas.
2	Sulistia Ningsih: Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Gelandangan dan Pengemis Di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2022	Kualitatif	Teori konsep, Subjek, objek penelitian, dan metode yang digunakan.	Berdasarkan Peraturan menteri Sosial Republik Indonesia No 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial pada pasal 17.	Dapat diperoleh hasil bahwa Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum berjalan optimal mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar dan kurang tepatnya waktu Pelaksanaan rehabilitasi, kurang tegasnya sanksi, kurangnya pengawasan pasca rehabilitas dan pemberian modal serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

No.	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Perbedaan	Teori Konsep	Hasil Penelitian
3	Muhammad Rasyid: Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Di Kota Batam tahun 2022	Kualitatif	Subjek, objek penelitian, metode yang digunakan	1. sosialisasi program 2. tujuan program 3. ketepatan sasaran program 4. pemantauan program	Hasil menunjukkan bahwa efektivitas program rehabilitasi sosial gelandangan pengemis dikota Batam sudah berjalan cukup baik namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan seperti, masih kurangnya komunikasi, sumber daya.

Sumber: Hasil Penelitian 2024

Tabel 2.1 jika dibandingkan ketiganya dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu dalam penelitian ini berfokus pada efektivitas terhadap gelandangan dan pengemis. Setiap penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan di setiap penelitian yaitu dari lokasi penelitian, permasalahan yang diteliti, teori konsep, judul dan metode/pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu meneliti mengenai efektivitas pelayanan dan rehabilitasi sosial, sedangkan penelitian ini mengenai efektivitas program pelayanan dan pembinaan. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di lokasi berbeda dari penelitian terdahulu, yaitu di Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya. Perbedaan tersebut menjadi daya tarik tersendiri dan kebaruan bagi peneliti untuk melakukan penelitian di lokasi yang telah peneliti pilih.

2.2 Tinjauan Teoritis/Konseptual

2.2.1 Tinjauan tentang Efektivitas

Tinjauan yang dibahas mengenai efektivitas adalah pengertian, ukuran dan aspek-aspek dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Menurut Fuadah (2018) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Menurut Safuridar (2017) menjelaskan efektivitas suatu kegiatan dapat tercapai jika berbagai faktor tersebut terpenuhi, seperti berjalannya tugas atau fungsi dengan baik, adanya rencana atau program kegiatan, berfungsinya aturan yang telah ditetapkan, serta pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan biasanya diukur berdasarkan tingkat efektivitas kegiatan dalam mencapai tujuan tersebut.

Kegiatan dianggap efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dengan kata lain, efektivitas adalah kondisi yang menunjukkan keberhasilan dari tindakan atau usaha yang dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi yang diinginkan (Yanuarita & Sakra, 2019). Pendapat Beni (2016) menyatakan efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan

pelayanan masyarakat yang sarannya telah ditentukan. Robbins dalam Norsanti (2021) mengemukakan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas adalah tolak ukur yang menyatakan seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai sesuai dengan pelaksanaan dan perencanaannya. Efektivitas juga dapat diartikan pencapaian tujuan secara tepat dari serangkaian alternatif dan pilihan cara dengan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya untuk menentukan keberhasilan kegiatan.

2.2.1.2 Aspek-aspek Efektivitas

Menurut Budiani (2007) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut: 1) Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. 2) Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya, dan secara khusus pada sasaran program. Karena menurut Budiani sosialisasi harus dilakukan agar program bisa diefektif secara utuh dan menyeluruh oleh masyarakat tentang bagaimana kegiatannya, manfaat, serta pelaksanaan programnya. Bagian-bagian tersebut antara lain bentuk sosialisasi, media sosialisasi, intensitas sosialisasi, tujuan sosialisasi, dan manfaat sosialisasi. 3) Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengetahui

ukuran efektif atau tidaknya suatu program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program. 4) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian pelaksana program kepada peserta program. Pemantauan dilakukan untuk menyediakan informasi apakah program memberikan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi peserta pasca mengikuti program. Kegiatan ini penting dilakukan agar dapat diidentifikasi ketika dalam pelaksanaan program berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan sehingga diketahui kekurangannya yang kemudian dicarikan solusi dari permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas aspek-aspek untuk mengukur efektivitas yaitu ketepatan sasaran merupakan pengukuran sejauh mana peserta program atau orang benar-benar berhak menerima program. Sosialisasi program yaitu penyebaran informasi mengenai suatu program serta kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi sehingga informasi program tersebut dapat tersampaikan kepada sasaran peserta program. Tujuan program yaitu target yang ingin dicapai dalam program dan merupakan hasil akhir yang hendak di capai dalam program tersebut. Pemantauan program yaitu pengawasan dan pengontrolan pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan saat dan setelah dilaksanakannya program tersebut.

Muasaroh (2010) mengungkapkan efektivitas dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran

akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik

2. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif
3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif
4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik.

Berdasarkan pendapat ahli diatas aspek-aspek efektivitas adalah aspek tugas atau fungsi yaitu organisasi atau lembaga dikatakan efektif jika melaksanakan tugas dan fungsi. Aspek rencana atau program yaitu apabila rencana dapat berjalan sesuai rencana program dapat dikatakan efektif. Aspek ketentuan dan peraturan yaitu program juga dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dan jika dilaksanakan dengan baik ketentuan dan aturan telah berlaku efektif. Aspek tujuan atau kondisi ideal yaitu kegiatan dikatakan efektif dilihat dari hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.

Sutrisno (2010) menjelaskan pengukuran efektivitas dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Pemahaman Program, yaitu realisasi program sehingga program dapat berjalan dengan lancar. Pemahaman program sangat diperlukan oleh para sasaran program agar program dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan.
2. Ketepatan Sasaran, yaitu sasaran yang dituju harus berkesesuaian dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya agar program dapat dilaksanakan dengan efektif.
3. Ketepatan Waktu, yaitu suatu program dikatakan efektif apabila sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan semakin tepat waktu suatu program maka semakin efektif pula program tersebut.
4. Tercapainya Tujuan, yaitu apabila semakin memberikan manfaat suatu program maka semakin efektif pula program tersebut. Apabila program sudah sesuai dengan yang direncanakan serta sesuai dengan sasaran maka program tersebut juga dikatakan efektif atau tercapainya tujuan.
5. Perubahan Nyata, yaitu suatu program dikatakan efektif apabila program memiliki perubahan nyata yang diperoleh secara langsung oleh sasaran program. Perubahan nyata ini melihat sejauh mana program tersebut memberikan suatu efek atau dampak bagi perubahan nyata sasaran program tersebut.

Duncan dalam Handayani (2016) menyatakan mengenai indikator efektivitas, adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan, merupakan salah satu indikator efektivitas suatu program. Pencapaian tujuan diartikan semua usaha yang dilakukan harus dipandang

sebagai suatu proses. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan akan melewati tahapan-tahapan proses bagiannya maupun proses periodisasinya.

2. Integrasi, merupakan suatu pengukuran terhadap seberapa baik kemampuan suatu organisasi dalam mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus atau kesepakatan bersama antara anggota-anggota kelompok masyarakat mengenai nilai-nilai tertentu. Integrasi sangat erat kaitannya dengan proses sosialisasi.
3. Adaptasi, merupakan pengukuran bagaimana sebuah organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk mengubah prosedur standar operasinya jika lingkungan berubah. Organisasi yang baik adalah organisasi yang dinamis, yang dapat berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Adaptasi berkaitan dengan kesesuaian pelaksana program dengan keadaan..

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, mengenai aspek-aspek efektivitas yang telah dikemukakan, aspek-aspek efektivitas dapat diukur dengan cara membandingkan rencana yang ditetapkan dengan hasil nyata yang telah direalisasikan. Efektivitas juga dapat diukur dengan cara dilihat dari ketepatan sasaran, tercapainya tujuan, pemantauan program, sosialisasi program, ketentuan waktu, dan perubahan nyata. Jika aspek-aspek efektivitas memenuhi dalam pelaksanaan program tersebut dengan baik dapat dikatakan program tersebut efektif.

2.2.2 Tinjauan tentang Pelayanan Sosial

Tinjauan yang dibahas mengenai pelayanan sosial adalah pengertian pelayanan sosial, ruang lingkup pelayanan sosial, dan tujuan pelayanan sosial yang akan dijelaskan sebagai berikut:

2.2.2.1 Pengertian Pelayanan Sosial

Menurut Huraerah dalam Febrianti, A., dan Fahrudin, A. (2020), pelayanan sosial adalah kegiatan terorganisir yang ditujukan untuk membantu warga negara yang mengalami permasalahan sebagai akibat ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi-fungsinya. Kegiatan ini antara lain berupa pelayanan sosial bagi anak serta usia lanjut terlantar atau mengalami bentuk kecacatan.

Menurut Sudiro dalam Nandang, M., Resnawaty, R., & Wahyudi, A. (2019) menyatakan pelayanan sosial merupakan rangkaian usaha pemberian bantuan yang ditujukan kepada manusia atau kelompok manusia dan pemecahan masalah-masalah kesejahteraan sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, antara lain ekonomi, pendidikan, perbaikan lingkungan, dan kesehatan.

Muhidin dalam Tristanto (2020) menyampaikan pelayanan sosial dalam arti luas adalah pelayanan sosial yang mencakup fungsi pengembangan termasuk pelayanan sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, tenaga kerja dan sebagainya. Sedangkan pelayanan sosial dalam arti sempit atau disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, cacat, tuna sosial dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut pelayanan sosial ditujukan kepada seseorang atau kelompok kurang beruntung yang membutuhkan pertolongan dan mengalami permasalahan sosial, untuk diberikan pelayanan sosial agar bisa membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelayanan sosial juga perlindungan yang diberikan untuk seseorang atau kelompok yang dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah khususnya kesejahteraan sosial.

2.2.2.2 Fungsi Pelayanan Sosial

Fahrudin (2012) menjelaskan tentang fungsi-fungsi pelayanan sosial adalah pelayanan-pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan, pelayanan-pelayanan untuk terapi, pertolongan, dan rehabilitasi termasuk perlindungan sosial dan perawatan pengganti, pelayanan-pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi, dan nasihat.

Menurut Alfred J. Kahn dalam Hikmawati, E (2011) menyatakan fungsi-fungsi pelayanan sosial adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan
2. Pelayanan sosial untuk penyembuhan, pemberian bantuan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial dan
3. Pelayanan sosial untuk membantu orang menjangkau dan menggunakan pelayanan yang sudah ada dan pemberian informasi dan nasihat.

Pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan diadakan untuk melindungi, mengadakan perubahan, atau menyempurnakan kegiatan pendidikan, asuhan anak, penanaman nilai, dan pengembangan hubungan sosial di masa lampau menjadi fungsi keluarga, lingkungan tetangga, dan kerabat. Pelayanan sosial untuk

penyembuhan, pemberian bantuan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial mempunyai tujuan untuk membantu perorangan yang mengalami masalah-masalah dengan jalan menggunakan kelompok primer untuk memperkuat atau menggantikan fungsi-fungsi yang sudah tidak mengalami gangguan.

Muhidin dalam Putri, N., & Nulhaqim, S. (2023) menyatakan terdapat berbagai fungsi pelayanan sosial, diantaranya:

1. Pelayanan sosial untuk pengembangan dan sosialisasi, memiliki tujuan untuk menanamkan nilai-nilai masyarakat dalam rangka menunjang pengembangan kepribadian.
2. Pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan, serta rehabilitasi, memiliki tujuan untuk memberikan kepada seseorang baik secara individu maupun kelompok yang berguna mampu mengatasi permasalahannya sendiri.
3. Pelayanan akses, merupakan pelayanan yang memerlukan birokrasi yang modern. Pelayanan ini bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan akses ke berbagai layanan atau program yang sebelumnya sulit diakses.

2.2.3 Tinjauan tentang Pembinaan Sosial

2.2.3.1 Pengertian Pembinaan Sosial

Pembinaan merupakan suatu kegiatan yang menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Pembinaan adalah untuk merubah seseorang menjadi baik dan mampu untuk hidup mandiri, ini berkenaan dengan bagaimana tujuan yang di sosialisasikan kepada organisasi atau publik dan manfaat dari tujuan itu (Purnama & Yuliani, 2015). Menurut Mangunhardjana dalam Oktaviani (2020) pembinaan

merupakan suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, yang bertujuan untuk membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah hidup dan kerja atau yang sedang dijalani serta menjadi lebih efektif. Mukhlisin (2021) mendeskripsikan pembinaan sosial adalah latihan, pendidikan, pembinaan yang ditekankan pada perubahan perilaku sosial sehingga mencapai sikap dan kecakapan sosial yang diharapkan.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut pembinaan sosial adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian yang bersumber dari nilai-nilai yang ada di masyarakat baik secara individu maupun berkelompok. Pembinaan sosial juga kegiatan yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas dalam diri serta perilaku dalam berupa pelatihan bimbingan untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

2.2.3.2 Tujuan Pembinaan

Harsono dalam Damasynta (2015) mengemukakan tujuan pembinaan adalah pemyarakatan yang dibagi menjadi tiga, meliputi: 1) Setelah keluar dari lembaga pemyarakatan, diharapkan peserta binaan tidak lagi melakukan tindak pidana; 2) Menjadi manusia berguna, berperan aktif, dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya; 3) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Tujuan diadakannya kegiatan pembinaan menurut Asmawati (2008:45) yaitu adanya perubahan pola hidup warga binaan menjadi lebih produktif,

meningkatkan keterampilan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, serta berperan aktif dalam keluarga dan masyarakat di lingkungannya.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas tujuan pembinaan adalah untuk menjadikan seseorang atau warga binaan menjadi manusia yang berguna dan dapat merubah pola hidupnya sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat supaya tidak kembali berperilaku menyimpang. Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kebahagiaan dan mensejahterakan hidupnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan.

2.2.3.3 Bentuk-bentuk Pembinaan

Menurut Prathama (2015:8) bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan kepada warga binaan yaitu:

1. Pembinaan mental, merupakan dasar bagi seseorang yang telah terjerumus terhadap perbuatan menyimpang yang pada umumnya orang melakukan penyimpangan karena kondisi mentalnya terganggu sehingga diperlukan pemulihan mental seperti sediakala
2. Pembinaan sosial, diberikan kepada peserta binaan yang sudah disingkirkan dari kelompoknya sehingga perlu upaya untuk memulihkan Kembali kesatuan hubungan antara peserta binaan dengan Masyarakat sekitarnya
3. Pembinaan keterampilan, diupayakan untuk memberikan bentuk pengetahuan mengenai keterampilan.

Kartini (2012) menyatakan pola pembinaan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terdiri dari pembinaan kesadaran beragama, pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum, dan pembinaan dalam rangka mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Selanjutnya pembinaan kemandirian meliputi keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, keterampilan

yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing, serta keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi.

Irwanto (2017) mengemukakan bentuk-bentuk pembinaan yaitu: 1) Pembinaan jasmani adalah kondisi fisik yang sehat yang dapat membuat anak bereaksi cepat, tanggap, dan terampil dan syarat utama untuk mencapai pembinaan yang baik; 2) Pembinaan budaya dan agama yaitu menjadi fokus kajian yang baik, dikarenakan memperkenalkan budaya dan agama untuk memahami aspek atau keyakinan yang perlu ditaati dalam kehidupan sehari-hari; 3) Pembinaan intelektual yaitu diperuntukan agar anak asuhan dapat menangani permasalahan hidup yang dialami karena dalam kehidupan tidak mudah tanpa adanya kekuatan mental; 4) Pembinaan pekerjaan dan profesi yaitu pengembangan anak asuh menjadi terampil, termotivasi, aktif, kreatif dan mampu bertanggung jawab terhadap pekerjaan di masa yang akan datang.

Pendapat beberapa ahli diatas mengemukakan bentuk-bentuk pembinaan diantaranya pembinaan mental, pembinaan sosial, pembinaan keterampilan, pembinaan fisik, pembinaan orientasi, pembinaan kecakapan, pembinaan pengembangan kepribadian, pembinaan kemandirian, pembinaan kerja, pembinaan penyegaran, dan pembinaan lapangan. Bentuk-bentuk pembinaan menjadikan warga binaan lebih baik lagi dari sebelumnya dengan melakukan bimbingan serta kegiatan yang positif.

2.2.4 Standar Pelayanan Minimal Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Pembinaan Sosial Gelandangan dan Pengemis

Permensos No. 9 Tahun 2018 Pasal 9 Ayat 1 menyatakan tentang rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam panti sosial mempunyai kriteria:

1. Kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
 2. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus;
 3. Tidak memiliki tempat tinggal yang tetap; dan
 4. Tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan atau masyarakat yang peduli.
- Permensos No. 9 Tahun 2018 Pasal 14 Ayat 2 standar jumlah dan kualitas

barang atau jasa yang harus diterima oleh gelandangan dan pengemis di dalam panti sosial merupakan kebutuhan dasar terdiri atas: 1) Permakanan; 2) Sandang; 3) Asrama/*cottage* yang mudah di akses; 4) Perbekalan kesehatan; 5) Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial; 6) Bimbingan keterampilan dasar; 7) Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas anak; 8) Akses ke layanan kesehatan dasar; dan/atau 9) Pemulangan ke daerah asal.

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima gelandangan dan pengemis diluar panti sosial berupa pelayanan terdiri atas:

1. Permensos No. 9 Tahun 2018 Pasal 32 Ayat 1 dan 2 mengenai tentang data dan pengaduan yaitu untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Layanan pengaduan berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas

sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhinya kebutuhan dasar.

2. Permensos No. 9 Tahun 2018 Pasal 33 Ayat 1 mengenai tentang kedaruratan yaitu tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
3. Permensos No. 9 Tahun 2018 Pasal 34 Ayat 1 mengenai tentang pemenuhan kebutuhan dasar meliputi permakanaan diberikan paling lama tujuh hari, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, sosial, fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, kartu identitas anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial, dan rujukan.

Permensos No. 9 Tahun 2018 Pasal 39 Ayat 1 mengenai tentang ketentuan mengenai standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial meliputi tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, penyuluh sosial dan relawan sosial. Setiap panti sosial harus memiliki paling sedikit satu orang pekerja sosial profesional. Permensos No. 9 Tahun 2018 Pasal 34 Ayat 2 mengenai tentang pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial yaitu diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial.

2.2.5 Tinjauan tentang Gelandangan dan Pengemis

Tinjauan yang akan dibahas dalam tinjauan tentang gelandangan dan pengemis adalah pengertian gelandangan dan pengemis, karakteristik gelandangan dan pengemis, serta faktor penyebab gelandangan dan pengemis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

2.2.5.1 Pengertian Gelandangan dan Pengemis

1. Pengertian Gelandangan

Sastraatmadja dalam Ramadhani (2021) mengemukakan ialah sekelompok masyarakat yang terasing ini sering ditemukan dalam situasi yang tidak biasa, seperti di bawah jembatan, di lorong-lorong sempit, di sekitar rel kereta api, atau di depan toko-toko. Dalam kehidupan mereka, mereka tampak sangat berbeda dari orang-orang yang hidup merdeka pada umumnya.

Fitri (2019) mengemukakan Gelandangan adalah orang-orang yang hidup tidak layak kondisinya bertentangan dengan aturan masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap dan kehidupannya berpindah-pindah dari satu ke tempat yang lain. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 menjelaskan bahwa gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut gelandangan adalah seseorang atau kelompok yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dan hidup dijalan

atau tempat umum. Gelandangan juga orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan hanya berkeliling tidak ada tujuan.

2. Pengertian Pengemis

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Pengemis adalah seseorang yang memperoleh penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan agar mendapatkan belas kasihan orang lain (Purnama & Yuliani, 2015). Soesilo dalam Ramadhani (2021) mendefinisikan minta-minta atau mengemis dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak gerik, termasuk juga menjual lagu-lagu dengan jalan menyanyi main biola, gitar, angklung seruling serta menyodorkan permainan sepanjang toko-toko dan rumah yang biasa dilakukan di kota besar.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas pengemis adalah orang yang mencari uang dengan hasil meminta-minta dengan berupa mengharapkan belas kasihan orang lain. Pengemis mengemis dikarenakan kurangnya perekonomian dan tidak mempunyai pekerjaan.

2.2.5.2 Karakteristik Gelandangan dan Pengemis

Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis menjelaskan, kriteria merupakan sesuatu yang khas atau menjadi pembeda dari seseorang atau suatu benda. Karakteristik dapat berupa ciri-ciri fisik atau tindakan seseorang tersebut. Karakteristik gelandangan dan pengemis dijelaskan sebagai berikut:

1. Karakteristik gelandangan antara lain:

- 1) Seorang laki-laki/Perempuan usia 18-59 tahun, tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar.
- 2) Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya
- 3) Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas, dan lain-lain
- 4) Tanpa rencana hari kedepan anak-anaknya maupun dirinya

2. Karakteristik pengemis antara lain:

- 1) Mata pencaharian tergantung pada belas kasihan orang lain
- 2) Berpakaian kumuh, compang camping dan tidak wajar
- 3) Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

Ciri-ciri gelandangan dan pengemis yang dikemukakan Fadri (2019)

sebagai berikut:

1. Tidak memiliki tempat tinggal atau tempat hunian;
2. Hidup dengan penuh ketidakpastian;
3. Hidup di bawah garis kemiskinan, tidak memiliki penghasilan yang tetap untuk kehidupan mereka;
4. Tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak;
5. Memakai baju compang camping;
6. Meminta-minta dengan cara berpura-pura atau sedikit memaksa disertai dengan tutur kata yang manis dan iba;
7. Tuna etika dalam artian saling tukar-menukar istri atau suami;
8. Meminta-minta di tempat umum, seperti terminal bus, stasiun kereta api, di rumah-rumah atau di toko.

Berdasarkan penjelasan diatas karakteristik dan ciri-ciri gelandangan dan pengemis yaitu orang berusia 18-59 tahun yang hidup mengembara di tempat

umum, tanpa identitas diri, pekerjaan tetap, atau rencana masa depan. Sering kali mereka meminta-minta di tempat umum dengan memanfaatkan orang lain untuk menarik simpati. Gelandangan dan pengemis juga tidak memiliki tempat tinggal tetap dan menjalani kehidupan yang penuh ketidakpastian, dan terkadang melanggar norma etika.

2.2.5.3 Usia Dewasa

Menurut Hurlock dalam Jannah (2017) usia dewasa diklasifikasikan menjadi 3 periode yaitu:

1. Periode Dewasa Awal (*Early Adulthood*)

Masa dewasa dini dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif.

2. Periode Dewasa Madya (*Middle Adulthood*)

Masa dewasa madya yaitu masa yang dimulai pada umur 40 tahun sampai pada umur 60 taun, yakni saat baik menurunnya kemampuan fisik dan psikologis yang jelas nampak pada setiap orang.

3. Periode Dewasa Akhir (*Late Adulthood*)

Masa dewasa akhir atau masa dewasa lanjut dimulai pada umur 60 tahun sampai kematian. Pada waktu ini baik kemampuan fisik maupun psikologis cepat menurun, tetapi teknik pengobatan modern tetap seperti kala mereka masih lebih muda.

2.2.5.4 Faktor Penyebab Gelandangan dan Pengemis

Irawan (2013) menyatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis tersebut, yaitu:

1. Merantau dengan modal nekad, dari gelandangan dan pengemis yang berkeliaran dalam kehidupan masyarakat khususnya di kota-kota besar, banyak dari mereka yang merupakan orang desa yang ingin sukses di kota tanpa memiliki kemampuan ataupun modal yang kuat. Sesampainya di kota, mereka berusaha dan mencoba meskipun hanya dengan ketekatan untuk bertahan menghadapi kerasnya hidup di kota. Kemampuan yang terbatas, modal nekad dan tidak adanya jaminan tempat tinggal membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa sehingga mereka memilih menjadi gelandangan dan pengemis.
2. Malas Berusaha, perilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan uang tanpa usaha, payah cenderung membuat sebagian masyarakat menjadi malas dan ingin instan tanpa berusaha terlebih dahulu.
3. Cacat Fisik, adanya keterbatasan kemampuan fisik dapat juga mendorong seseorang untuk memilih seseorang menjadi gelandangan dan pengemis. Sulitnya lapangan pekerjaan bagi penyandang cacat fisik mendapatkan pekerjaan yang layak membuat mereka putus asa dan bertahan hidup dengan cara menjadi gelandangan dan pengemis.
4. Tidak adanya lapangan pekerjaan, sulitnya mencari pekerjaan apalagi yang tidak pernah sekolah atau tidak memiliki kemampuan akademis membuat seseorang menjadikan meminta-minta sebagai pekerjaan yang bisa dilakukan.

5. Tradisi yang turun temurun, menggelandang dan mengemis merupakan sebuah tradisi yang sudah ada dari zaman dahulu bahkan berlangsung turun temurun kepada anak cucu.
6. Harga kebutuhan pokok yang mahal, untuk beberapa orang dalam menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok dan memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan giat bekerja tanpa mengesampingkan harga diri, namun ada sebagian yang lainnya lebih memutuskan untuk mengemis karena berpikir tidak ada acara lagi untuk memenuhi kehidupan hidupnya.
7. Kemiskinan dan terlilit masalah ekonomi, sebagian besar gelandangan dan pengemis adalah orang tidak mampu yang tidak berdaya dalam menghadapi masalah ekonomi yang sedang berlangsung. Permasalahan ekonomi yang sudah akut mengakibatkan orang-orang hidup dalam krisis ekonomi hidupnya sehingga menjadi gelandangan dan pengemis adalah sebagai jalan bagi mereka untuk bertahan hidup.

Alkotsar dalam Triana, Y., & Kristian, I. (2021) menjelaskan faktor penyebab gelandangan dan pengemis dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Internal, munculnya gelandangan ini meliputi sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik dan adanya cacat psikis (jiwa).
2. Faktor Eksternal, munculnya gelandangan dan pengemis meliputi faktor sosial, kultural atau budaya, ekonomi, Pendidikan, lingkungan, agama, dan letak geografis.

Penyebab munculnya gelandangan dan pengemis menurut Pane dalam Maryatun et al. (2022) yakni bisa berasal dari individu (internal) maupun luar individu (eksternal). Secara internal karena adanya faktor kemiskinan, umur, rendahnya pendidikan, rendahnya keterampilan, minimnya izin orang tua serta sikap mental yang dimiliki setiap individu. Penyebab secara eksternal karena adanya faktor kondisi hidrologis, pertanian, sarana prasarana, akses informasi, modal usaha, kondisi yang primitif pada masyarakat perkotaan dan kurangnya penanganan gelandangan dan pengemis di kota.

Berdasarkan faktor penyebab beberapa ahli tersebut seseorang atau sekelompok orang menjadi gelandangan dan pengemis disebabkan oleh berbagai macam faktor baik internal individu maupun eksternal. Faktor internal meliputi sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang lemah, adanya cacat fisik. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, lingkungan, agama, dan letak geografis. Faktor penyebab munculnya gelandangan dan pengemis bisa dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi diri yang peminta-minta, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi di luar yang bersangkutan.

2.2.6 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial dengan Kemiskinan

Tinjauan tentang pekerja sosial dengan kemiskinan memuat penjelasan tentang pengertian pekerjaan sosial, tujuan pekerjaan sosial, dan peran pekerja sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis.

2.2.6.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Zastrow (2017) menjelaskan bahwa pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional membantu individu-individu, kelompok, keluarga, organisasi, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kapasitas sosial mereka agar berfungsi dan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang mendukung mampu mencapai tujuan mereka.

Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) dalam Fahrudin (2012) menyatakan pekerjaan sosial merupakan suatu kegiatan profesional yang membantu individu, kelompok ataupun masyarakat dalam meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka dalam keberfungsian sosialnya dan menciptakan kondisi yang mendukung. Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang pekerjaan sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat diartikan pekerjaan sosial adalah suatu kegiatan dan profesi pekerja sosial yang dapat membantu individu, keluarga atau organisasi dalam mengatasi masalah agar dapat berjalan keberfungsian sosialnya. Pekerja sosial merupakan profesi yang berdasarkan ilmu pengetahuan, kemampuan, nilai dengan membantu memecahkan masalah mereka khususnya masalah kesejahteraan sosial.

2.2.6.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Asosiasi Nasional Pekerjaan Sosial Amerika Serikat (NASW) dalam Zastrow (2017) menyatakan bahwa tujuan pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi masalah (*coping*), dan pengembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan, dan kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerja secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial dan memajukan kesejahteraan manusia dan masyarakat.

Pendapat lain menurut Sitepu dalam Pratiwi (2022) tujuan pekerja sosial yaitu terciptanya keadilan sosial maupun ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dengan membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Profesi pekerja sosial membantu meningkatkan kesejahteraan sosial pada individu maupun masyarakat yang rentan, tertindas, dan miskin.

Zastrow dalam Fahrudin (2012:67) berpendapat mengenai tujuan pekerjaan sosial sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi penindasan dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya;
2. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang dapat meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi;
3. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat memajukan praktik pekerjaan sosial;
4. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

2.2.6.3 Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Peran-peran pekerja sosial menurut Parsons, dkk dalam Suharto (2005) yang berkaitan dengan peran pekerja sosial gelandangan dan pengemis antara lain sebagai berikut:

1. Broker

Peran sebagai perantara yaitu, menghubungkan individu, kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat. Peran perantara dalam proses pendampingan sosial ada tiga yaitu: 1) mampu mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat; 2) mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten; 3) mampu mengevaluasi efektifitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan penerima manfaat.

2. Advokat

Peran pembela dalam praktek pekerjaan sosial dengan masyarakat, seringkali pekerja sosial harus berhadapan dengan sistem politik dalam rangka menjamin kebutuhan serta sumber yang diperlukan oleh masyarakat atau dalam melaksanakan

tujuan pengembangan masyarakat. Manakala pelayanan dan sumber sulit dijangkau oleh masyarakat, pekerja sosial harus memainkan peran sebagai pembela.

3. Fasilitator

Peranan sebagai fasilitator atau pemungkin yaitu pekerja sosial bertanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Fasilitator juga memberikan kesempatan dan fasilitas yang diperlukan

klien untuk mengatasi masalahnya, memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan potensi yang dimiliki klien.

4. Mediator

Peran sebagai mediator yaitu, memberikan layanan mediasi jika klien mengalami konflik dengan pihak lain atau orang lain agar dicapai kesesuaian antara tujuan dan kesejahteraan diantara kedua belah pihak.

5. Pelindung

Pekerja sosial dalam melakukan peran sebagai pelindung (*guardian role*), pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang beresiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut: 1) kekuasaan, 2) pengaruh, 3) otoritas, dan 4) pengawasan sosial. Tugas-tugas peran pelindung meliputi: 1) menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama; 2) menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan proses perlindungan, dan 3) berkomunikasi dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan tanggungjawab etis, legal dan rasional praktek pekerjaan sosial.

6. Motivator

Suharto (2007) menjelaskan Pekerja Sosial dalam peran ini membantu seseorang untuk memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu dan bisa memperbaiki situasi yang sedang ia alami. Hal ini karena tanpa adanya keyakinan yang muncul pada klien itu sendiri, motivasi yang diberikan Pekerja Sosial tidak akan mencapai hasil yang maksimal.

7. Konselor

Konseling adalah salah satu teknik dalam pekerjaan sosial dengan individu (*social work with individu*) yang dikenal dengan metode casework atau terapi individu karena dalam proses konseling, Pekerja Sosial bekerja secara langsung berhadapan dengan klien berdasarkan relasi satu persatu (*one-to-one relation*). Peran ini tidak dapat begitu saja diperankan oleh siapa saja. Konseling yang dilakukan merupakan metode professional yang diperoleh dari pendidikan formal maupun pengalaman yang telah teruji.

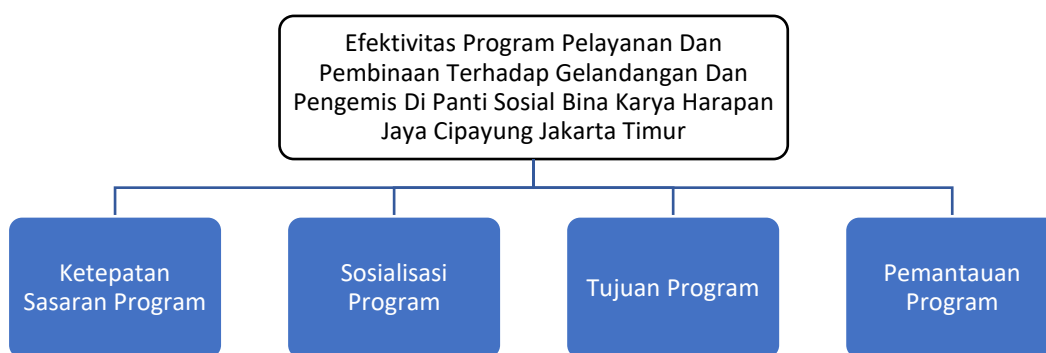
Berdasarkan penjelasan tersebut, pekerja sosial memiliki peran untuk memberikan pelayanan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung, serta diarahkan juga untuk membantu individu, kelompok ataupun masyarakat dalam menjalankan fungsi sosialnya. Berkaitan dengan peran pekerja sosial dalam menangani gelandangan pengemis yaitu peran Broker menghubungkan individu, kelompok gelandangan pengemis dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat. Menghubungkan klien dengan sistem sumber serta mencakup dengan pelayanan lembaga yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan hidup klien, mengawasi atau melakukan monitoring yang terus menerus terhadap lembaga dan semua jaringan pelayanan untuk menjamin bahwa pelayanan memiliki mutu dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Peran selanjutnya yaitu Fasilitator, pekerja sosial juga memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Pekerja sosial harus bervariasi dalam memberikan pelayanannya tergantung kebutuhan klien dan permasalahan yang dialaminya agar

mampu berfikir secara jelas tentang apa yang dibutuhkan dalam proses rehabilitasi atau pelayanan bagi gelandangan dan pengemis.

Peran Advokat yaitu, Advokat pekerja sosial sebagai juru bicara klien atau penerima layanan, menjelaskan dan mendiskusikan tentang masalah klien, membela kepentingan klien, dan memberikan serta menyediakan pelayanan yang dibutuhkan oleh gelandangan dan pengemis. Oleh karena itu, pekerja sosial harus berhadapan dengan sistem politik yang menjamin kebutuhan serta sumber yang dibutuhkan gelandangan dan pengemis.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengemukakan efektivitas program pelayanan dan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis. Efektivitas terbagi menjadi 4 jenis, yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Ketepatan sasaran program mencakup peserta program yang sudah ditentukan sebelumnya sudah sesuai untuk orang yang benar-benar berhak menerima suatu program. Sosialisasi program mencakup informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada sasaran program. Tujuan program mencakup kesesuaian

antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang ditetapkan sebelumnya. Pemantauan program mencakup program memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi gelandangan dan pengemis setelah mengikuti program. Selanjutnya dari jenis efektivitas dapat mengukur sejauh mana efektivitas atau tidaknya program pelayanan dan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis di PSBK Harapan Jaya.